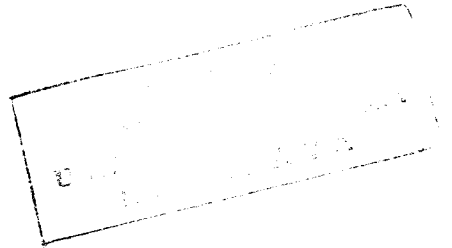


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. LATAR BELAKANG MASALAH



Masyarakat pada pasca-kemerdekaan mengalami pembelahan sosial yang sangat tajam. Pembelahan itu bersumber dari agama, etnisitas, kedaerahan, dan lainnya. Hal ini merupakan sumber pengelompokan politik, yang oleh Clifford Geertz disebut sebagai politik aliran, yang merupakan ciri perpolitikan pada masa itu. Masyarakat terbagi sesuai dengan pilar-pilar tertentu yang bersumber dari agama, etnisitas, dan kedaerahan. Pembelahan ini juga berdampak pada sistem kepartaian pada pasca-kemerdekaan. Dengan Maklumat Negara Republik Indonesia No. X tahun 1945, berdiri berbagai partai politik di Indonesia, sekaligus mengubah sistem partai tunggal bentukan Sockarno.<sup>1</sup> Partai-partai ini memiliki ideologi berbeda, mulai agama, nasional hingga sosialisme-komunisme. Konsekuensinya partai politik pun memiliki basis massa berbeda.

Herbert Feith dan Lance Castle mengelompokkan ke dalam lima aliran besar, yaitu: *Islam*, *Java Traditionalist*, *Democratic Socialist*, *Radical Nationalist*, dan

---

<sup>1</sup> Baca Daniel Dhakidae, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia," dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Seri Prisma, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 197 - 214.

*Communist*.<sup>2</sup> Kelima aliran ini mempunyai pengaruh kuat terhadap partai-partai politik saat itu. Satu aliran pemikiran politik tidak hanya berpengaruh pada satu partai politik, tetapi seringkali juga berpengaruh pada partai politik lain. Seringkali satu partai politik dengan aliran tertentu mengadakan koalisi dengan partai politik dengan aliran lain. PKI (Partai Komunis Indonesia) sangat kuat dipengaruhi Marxisme, PSI (Partai Sosialis Indonesia) sangat dipengaruhi oleh sosialisme demokratik, NU dan Masyumi dipengaruhi Islam, dan PNI (Partai Nasional Indonesia) dipengaruhi nasionalisme radikal.

Menurut Feith, dalam pemilu 1955 dengan isu-isu politik berbeda dari setiap partai politik, khususnya keempat partai besar, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nadhatul Ulama) dan PKI (Partai Komunis Indonesia), masyarakat Indonesia “seolah-olah” terbelah. Masyarakat priyayi, kaum nasionalis, dan abangan lebih condong memilih partai-partai politik non-agama seperti PNI, PKI, PSI, dan IPKI. Masyarakat muslim (santri) cenderung memilih partai-partai politik Islam, seperti Masyumi, NU, PSII, dan Perti.<sup>3</sup>

Geertz melihat politik aliran tidak terlepas dari akar budaya keagamaan pada masyarakat. Dalam kasus masyarakat Jawa di Pare, ia melihat bahwa ada trikotomi

---

<sup>2</sup> Seperti dikutip Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 92 - 94; baca juga tulisan Afan Gaffar, “Demokrasi Indonesia Masa Lampau, Kini dan Mendatang,” yang disampaikan pada Diskusi Sehari Prospek Demokratisasi dalam Kerangka Pelaksanaan UUD 1945 secara Murni dan Konsekuen, di Surabaya 22 Januari 1994.

<sup>3</sup> Baca Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Terjemahan, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

dalam masyarakat, yaitu *santri*, *priyayi* dan *abangan* -- meskipun ini dikritik sebagai trikotomi yang tidak berimbang, mestinya kultur *santri* harus “berhadapan” dengan kultur *abangan* sebagai pola perilaku keagamaan, sedangkan kultur *priyayi* “berhadapan” dengan kultur *wong cilik* (kultur petani). Peta masyarakat seperti yang digambarkan Geertz, menurut Gaffar, memperlihatkan pembelahan sosial yang bersifat *cummulative* dan *consolidated*, karena telah terjadi proses penguatan pengelompokan sosial, terutama di Jawa.<sup>4</sup>

Kultur-kultur ini mewarnai pilihan afiliasi politik. Orang-orang *abangan* mempunyai orientasi politik dan ekonomi yang berbeda dengan orang-orang *santri*. Orang-orang dengan kultur *priyayi* lebih merasa “aman” berada di bawah naungan PNI (Partai Nasional Indonesia), kultur *wong cilik* lebih memilih pada PNI dan PKI -- *wong cilik abangan* lebih pada PKI, sedangkan masyarakat *santri* lebih pada NU untuk *santri* konservatif dan Masyumi untuk *santri* modernis. Singkat kata, orang-orang *abangan* cenderung memilih untuk berpihak kepada partai politik yang tradisional, sekuler, dan nasionalistik, sedangkan orang-orang *santri* kepada partai politik Islam. Dengan organisasi-organisasi massa di bawah partai-partai politik, mereka semakin mengukuhkan dirinya sebagai kelompok yang berbeda, dan kehidupan sehari-hari terkadang harus “berhadap-hadapan,” namun ada ruang-ruang

---

<sup>4</sup> Lihat Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 126.

publik yang menyatukannya, seperti peringatan tujuh belas agustus dan hari raya Idul Fitri.<sup>5</sup>

Menurut Geertz, seperti dikutip Maswadi Rauf,<sup>6</sup> menguatnya politik aliran pada masa Orla dimulai dari pemanfaatan kesetiaan primordial (*primordial loyalties*) untuk kepentingan politik. Para politikus Indonesia waktu itu menggunakan kesetiaan primordial sebagai dasar bagi kesetiaan politik. Kesetiaan ini digunakan untuk membangun solidaritas politik yang akan dimanfaatkan oleh partai-partai politik atau kelompok-kelompok politik lainnya untuk memperoleh dukungan dari kelompok primordial yang bersangkutan. Pemanfaatan ikatan primordial ini menguntungkan para politikus karena mereka tidak harus bersusah payah mencari dan menciptakan sumber solidaritas politik. Mereka memanfaatkan kesetiaan primordial untuk kepentingan politik.

Partai-partai politik pada masa itu mempunyai basis massa yang dimobilisasi melalui pembentukan organisasi pendukung. PKI, misalnya, mempunyai sejumlah organisasi, seperti: Pemuda Rakyat, Gerwani, CGMI, IPPI, Sobsi, BTI, Lekra, dan PGRI Non-Vaksentral. PNI mempunyai organisasi pendukung seperti: Pemuda

---

<sup>5</sup> Baca Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terjemahan, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989. Baca juga Afan Gaffar, *Op.cit.*, hal. 126.

<sup>6</sup> Lihat tulisan Maswadi Rauf, "Konflik Politik dan Integrasi Nasional", dalam Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing (Penyunting), *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, hal. 89 - 90.

Marhaen, GMNI, GSNI, Petani, ISRI dan Leknas. Partai NU mempunyai Pemuda Anshor, Fathayat, PMII, IPPNU, Pertanu, dan Lesbumi. Dan Masyumi mempunyai GPII, HMI, PII, Gasbiindo, dan lainnya.<sup>7</sup> Yozar Anwar juga mencatat bahwa masyarakat kampuspun pada saat itu juga tidak luput dari pengaruh politik aliran. Ada beberapa organisasi mahasiswa yang merupakan “kepanjangan” atau *underbouw* dari partai-partai politik, seperti HMI dari Masyumi, PMII dari NU, GMNI dari PNI, GMKI dari Parkindo, CGMI dari PKI, dan PMKRI dari Partai Katolik.<sup>8</sup>

Pada masa Demokrasi dipimpin partai-partai politik itu juga berebut pengaruh di birokrasi. Akibatnya birokrasi menjadi arena pergulatan politik. Promosi jabatan seringkali lebih ditentukan oleh mekanisme *patronase* politik daripada ketentuan-ketentuan meritokrasi. Tidak jarang pelaksanaan keputusan-keputusan pemerintah lebih mencerminkan desakan kepentingan partai politik daripada respon terhadap desakan-desakan dari kelompok kepentingan masyarakat.<sup>9</sup> Akibat yang ditimbulkan dari kompetisi semacam itu adalah munculnya birokrasi yang tidak sehat, terpecah belah, dan mengalami politisasi yang hebat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>8</sup> Lihat Yozar Anwar, *Protes Kaum Muda*, Jakarta: Variasi Jaya, 1982.

<sup>9</sup> Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York: Cornell University Press, 1962, hal. 104.

<sup>10</sup> Baca Nazaruddin Sjamsuddin, “Netralitas Birokrasi di Indonesia,” makalah pada seminar nasional Politik Birokrasi di Indonesia, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 29 Juni 1990, hal. 10.

Karena birokrasi menjadi ajang perebutan pengaruh antar-berbagai kekuatan politik, aparat birokrasi menjadi terpolarisasi secara tajam dalam kutub-kutub ideologis dan golongan. Posisi-posisi strategis dalam birokrasi telah dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk kepentingan masing-masing. Implikasinya adalah terdapatnya loyalitas ganda pada aparat birokrasi. Di satu sisi, mereka loyal kepada pemerintah, di sisi lain mereka dituntut loyal kepada partai politik yang diwakilinya. Akibatnya adalah meluasnya penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan untuk kepentingan suatu partai politik dan merajalelanya korupsi. Hal ini telah menimbulkan kerapuhan institusi birokrasi. Keanggotaan dalam suatu partai politik dijadikan ukuran yang lebih menentukan daripada faktor-faktor kemampuan, keahlian, pengalaman kerja dan sebagainya. Hal ini jelas membuat birokrasi menjadi tidak efektif dan efisien.<sup>11</sup>

Karena itu, pemerintah Orba memandang politik aliran menjadi sumber dari berbagai macam konflik dan instabilitas politik. Pluralitas ideologi dilihat sebagai konsep Barat dan merupakan sumber pertentangan politik, karena kecenderungannya untuk dimanipulasi bagi kepentingan kelompok-kelompok yang saling bertentangan.<sup>12</sup> Apalagi pemerintah Orba menempatkan pembangunan ekonomi

---

<sup>11</sup> Lihat Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974, hal. 46 - 47.

<sup>12</sup> Baca tulisan Muhammad A.S. Hikam, "Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan dalam Politik di Indonesia," dalam *Prisma*, 3, Maret 1991, hal. 79.

sebagai prioritas utama. Strategi pembangunan demikian mensyaratkan adanya stabilitas politik. Pemerintahan oleh partai dan keikutsertaan partai politik dalam pemerintahan dianggap sebagai "masa lalu yang buruk" yang tidak perlu diulang.

Pada awal Orba hingga pertengahan tahun 1980-an wajah Islam babak belur dan digambarkan sebagai ekstrem kanan yang siap membentuk negara Islam dan menggantikan Pancasila dengan Islam sebagai ideologi atau dasar negara. Pemerintahan Soeharto menjalin dan memelihara koalisi sangat baik dengan kalangan *abangan*, kecuali kalangan Soekarnoïs, dan kalangan Kristen/Katolik, sementara Islam dalam posisi pinggiran.<sup>13</sup>

Keadaan tersebut berubah setelah Pancasila disepakati sebagai asas tunggal.<sup>14</sup> Gejala yang muncul saling mengakomodasi antara pemerintah dengan Islam. Salah satu bentuknya adalah pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tahun 1990 di Malang, Jawa Timur. Berdirinya ICMI dapat dibaca sebagai upaya pemerintah Orba mencari simbol-simbol politik baru setelah *economic growth* dan *good government* tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber legitimasi.<sup>15</sup> Selain itu,

---

<sup>13</sup> Afan Gaffar, "Politik Indonesia 1990-an: Rejuvenasi Aliran," makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Agama, Pembangunan, dan Globalisasi, yang diselenggarakan oleh LKPS bekerjasama dengan Pokja PKUB Jawa Timur. Makalah ini kemudian menjadi bagian dari buku Afan Gaffar berjudul *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

<sup>14</sup> Tentang bagaimana umat Islam merespon Pancasila sebagai asas tunggal dapat dibaca dalam Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 133 - 137. Tentang kilas balik berdirinya ICMI dan apakah ICMI menjadi wadah aspirasi umat Islam atau organisasi yang dihegemoni negara dapat dibaca hasil penelitian Aminudin

pemerintah Orba juga mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila dan Bank Muamalat.

Kelahiran dan perkembangan ICMI menimbulkan berbagai analisis politik. Beberapa kalangan, baik Islam maupun non-Islam, membaca berdirinya organisasi itu sebagai titik puncak munculnya kembali politik aliran di Indonesia, bahkan ada yang mempersepsikan sebagai usaha untuk mendirikan negara Islam. Organisasi ini juga dituduh sebagai organisasi yang membawa citra primordialis dan sektarian. Adi Sasono memberi label gejala itu sebagai "*ijo royo-royo*", yang merupakan refleksi dari penguatan politik aliran yang sektarian.<sup>16</sup> Dalam perkembangannya ICMI juga dibaca sebagai "kendaraan politik" Orba.<sup>17</sup> Organisasi ini juga dilihat sebagai gejala "birokratisasi" Islam, yang arti praktisnya adalah "penjinakan" umat Islam. Sebagai kekuatan politik, Islam tidak hendak dilumpuhkan, melainkan harus mendukung Orba.<sup>18</sup> Fachry Ali melihat, ICMI justru mengintegrasikan diri ke dalam negara,

---

dalam *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuatan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

<sup>16</sup> Baca tulisan Adi Sasono, "ICMI dan Politik Aliran," dalam Nasrullah Ali-Fauzi, *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 123 - 125. Kaitan antara ICMI dan politik aliran juga dapat dibaca dalam buku yang sama tulisan-tulisan Arief Budiman, "Indonesia yang Sedang Menunggu," hal. 99 - 102; Saiful Mujani, "Mitos Politik Aliran dan Aspirasi Politik ICMI Modernis Tanggapan Terhadap Adam Schwarz," hal. 103 - 119; dan Afan Gaffar, "ICMI: Politik Aliran?," hal. 120 - 122.

<sup>17</sup> Afan Gaffar, *Op.cit.*, hal. 137.

<sup>18</sup> Lihat tulisan M. Dawam Rahardjo, "Visi dan Misi Kehadiran ICMI: Sebuah Pengantar," dalam Nasrullah Ali-Fauzi (ed), *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 32.



reaksi yang timbul kemudian adalah kekecewaan. Integrasi itu berarti memperlemah potensi masyarakat sipil dan sebaliknya semakin memperkuat posisi negara.<sup>19</sup>

Fenomena menguatnya politik aliran juga nampak di birokrasi militer pada tahun 1999. Meskipun menyatakan sebagai kelompok yang sangat solid dengan Saptamarga-nya, di tubuh militer juga terjadi pembelahan dengan munculnya kelompok-kelompok politik aliran seperti ABRI Merah-Putih dan ABRI "ijo". ABRI Merah-Putih terdiri dari elite-elite militer yang mengklaim diri berideologi nasionalis, sedangkan ABRI "ijo" adalah elite-elite militer yang dianggap berideologi Islam. Beberapa pengamat menganggap pergantian beberapa jabatan di tubuh ABRI dalam rangka menyingkirkan ABRI "ijo".

Pemilu 1999 juga semakin mengukuhkan revitalisasi politik aliran. Dilihat dari asas partai politik, misalnya, dari 48 partai politik peserta Pemilu, 12 partai politik di antaranya menggunakan Islam sebagai asas, 34 partai politik menggunakan asas Pancasila, dan 2 partai politik (PRD dan PUDI) masing-masing menggunakan asas Sosial Demokratik Kerakyatan dan Demokrasi Relijius. Dari 34 partai politik yang menggunakan Pancasila sebagai asas, dua di antaranya (PKB dan PAN) merupakan partai politik yang berbasis massa Islam. Penghitungan suara Pemilu 1999 juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan menguatnya gejala politik aliran. PKB, PPP, dan PAN masing-masing memperoleh suara terbanyak ketiga, keempat,

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 126 - 143.

dan kelima. Selain itu, *stambus accord* delapan partai Islam menghasilkan 38 kursi di DPR.

Afan Gaffar<sup>20</sup> menilai pada masa transisi (pemerintahan B.J. Habibie) telah terjadi pemilahan sosial yang cenderung bersifat kumulatif atau konsolidatif (*cummulative or consolidated social clevages*). Terdapat kecenderungan untuk melakukan mobilisasi massa yang sangat tinggi yang menggunakan politik aliran seperti yang terjadi pada masa-masa pasca-kemerdekaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan partai-parati politik pada masa pemerintahan Habibie yang mencedawan didasarkan pada politik aliran tersebut. Agama biasanya dijadikan sumber mobilisasi sosial dan politik yang sangat efektif.

Pro dan kontra di kelompok-kelompok Islam terhadap pencalonan perempuan sebagai calon presiden juga menjadi bukti lain dari revitalisasi politik aliran di tingkat makro. Fenomena lain adalah rencana pembentukan Fraksi Reformis di DPR untuk meng-*goal*-kan calon presiden yang dapat menampung aspirasi umat Islam, serta pembentukan poros tengah sebagai respon terhadap stagnasi dialog antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Habibie dalam perebutan kursi kepresidenan hasil Pemilu 1999. Keduanya dipelopori oleh partai-partai politik Islam dan partai politik yang berbasis massa Islam. Tidak hanya itu, isu muslim dan non-muslim yang ditujukan pada salah satu partai politik peserta Pemilu 1999 dalam penyusunan calon

---

<sup>20</sup> Lihat Afan Gaffar, *Op.cit.*, hal. 357.

anggota legislatif juga menjadi fakta empiris tentang menguatnya kembali politik aliran.

Di tingkat mikro fenomena menguatnya kembali politik aliran juga terjadi di perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi -- yang menurut Muhammad Hatta<sup>21</sup> harus dapat melakukan penyelidikan dan memajukan segala lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan hidup kemasyarakatan -- nyatanya justru terjebak dalam konflik aliran. Dalam menjalankan Tri Dharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) diwarnai oleh konflik-konflik ideologi dan kepentingan. Di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, konflik antar-kelompok afinitas politik aliran menjadi fenomena yang selalu menyertai dinamika kehidupannya. Konflik antara HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dengan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dalam setiap pemilihan keanggotaan Senat dan BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) selalu terjadi. Upaya pemerintah Orba melakukan depolitisasi dan dealiranisasi melalui kebijakan NKK/BKK tidak mampu mereduksi konflik yang terjadi sangat tajam tersebut.

Heru Hendratmoko<sup>22</sup> mencatat, pada awal tahun 1990-an di Universitas Airlangga, Surabaya, ditemukan konflik antara dua kelompok besar dengan label

---

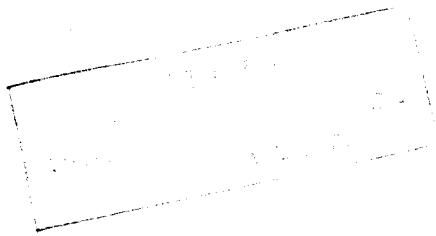
<sup>21</sup> Lihat tulisan Muhammad Hatta, "Tanggungjawab Moral Kaum Inteligensia," dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, Penyunting, *Cendeklawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1984, hal. 7.

<sup>22</sup> Baca Heru Hendratmoko, "Kondisi Obyektif, Subyektif Asal-usul Gerakan Mahasiswa," dalam *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, No. 9, Tahun VI, Surabaya: FISIP Universitas Airlangga, 1992.

bendera yaitu antara kelompok merah (kelompok nasionalis dan kelompok hijau (kelompok Islam/agamis). GMNI merupakan representasi dari kelompok merah, dan HMI merupakan representasi dari kelompok hijau. Di luar itu ada kelompok netral yang mencoba membersihkan diri dari pengaruh organisasi ekstra kampus. Pertarungan itu nampak sekali ketika ada pemilihan keanggotaan Senat dan BPM.

Konflik semacam itu juga terjadi di kalangan tenaga pengajar. Sebagai alumni masing-masing organisasi ekstra kampus, mereka saling berkonflik ketika memperebutkan jabatan di birokrasi kampus. Berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada awal tahun 1990 semakin mempertajam konflik ideologi di kalangan tenaga pengajar. Di Universitas Airlangga berkembang slogan Adipura yaitu "*Suroboyoku hijau dan bersih.*" Warna hijau dikonotasikan sebagai warna kelompok Islam, artinya sulit menduduki jabatan di birokrasi kampus jika tidak berbasis pada ICMI.

Demikian juga di STIP Surabaya, yang menjadi setting penelitian ini, tidak luput dari fenomena semacam itu. ICMI juga memperluas jaringannya di perguruan tinggi ini. Pada awal berdirinya di setiap jurusan STIP Surabaya diumumkan kepada dosen-dosen beragama Islam tentang keanggotaan organisasi tersebut. Dosen-dosen pun meresponnya, bahkan berkembang joke "kalau ingin menjadi pejabat harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota ICMI."



hanya itu, konflik antara dua kelompok tersebut juga terjadi di kalangan tenaga pengajar (dosen). Terbukti di perguruan tinggi itu muncul kelompok “abang” (eks GMNI), kelompok “ijo” (eks HMI), dan kelompok dosen muda (kelompok netral), yang di antara mereka saling berkonflik. Selain itu, kecuali kelompok dosen muda, kehadiran kelompok “abang” dan kelompok “ijo” tidak dapat dilepaskan dari akar historisnya. Kelompok “abang” mewadahi orang-orang nasionalis eks-PNI, sedangkan kelompok “ijo” mewadahi orang-orang santri, baik tradisional maupun modernis. Konflik antar-keduanya merupakan potret dari konflik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam pada masa Orde Lama.

## 1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami secara empiris dua permasalahan pokok berikut ini:

- 1) Bagaimana kelompok intelektual di perguruan tinggi memberi makna terhadap politik aliran di Indonesia?
- 2) Bagaimana hubungan antar-kelompok afinitas politik aliran tersebut?
- 3) Mengapa kelompok intelektual di perguruan tinggi memberi makna seperti itu terhadap politik aliran?

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

- 1) Mengungkap dan memahami respon kelompok intelektual di perguruan tinggi terhadap politik aliran yang mengalami revitalisasi dan cenderung menguat di Indonesia.
- 2) Mengungkap dan memahami implikasi respon tersebut terhadap hubungan antar-kelompok afinitas politik aliran.
- 3) Mengungkap dan memahami alasan-alasan subyektif kelompok intelektual dalam memberi makna politik aliran.